

DETERMINAN TATA KELOLA TEHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BKAD KOTA MALANG)

Donisia Sati¹

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
nosisati@gmail.com¹

Mochamad Fariz Irianto²

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
mochamadfarizirianto@unikama.ac.id²

Dimas Emha Amir Fikri Anas³

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
dimas@unikama.ac.id³

Supami Wahyu Setyowati⁴

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
setiyo@unikama.ac.id⁴

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
23 Januari 2024

Tanggal Revisi:
1 Februari 2024

Tanggal Diterima:
20 Februari 2024

Publikasi On line:
28 Maret 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Determinan Tata Kelola Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y). Penelitian ini menggunakan akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen (X). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (total sampling dan diperoleh sampel sebanyak 58 responden pegawai di Kantor BKAD Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Abstract

This research aims to test the determination of governance on the quality of Malang City regional government financial reports. The dependent variable in this research is the quality of financial reports (Y). This research uses accountability, transparency, human resource competence, and internal control system as independent variables (X). The data used in this research is primary data. The data collection method uses a questionnaire which is announced directly to respondents. The sampling technique used saturated sampling (total sampling and a sample of 58 employee respondents was obtained at the Malang City BKAD Office. The results of this research show that accountability, transparency, human resource competence and the internal control system simultaneously (together) have a significant effect on quality of financial reports, Accountability has a positive and significant effect on the quality of financial reports, Transparency has a positive and significant effect on the quality of financial reports, Human resource competency has a positive but not significant effect on the quality of financial reports and Internal control systems have a positive and significant effect on the quality of financial reports

Keywords: Accountability, transparency, human resource competency, internal control system, quality of local government financial reports.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud akan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik dan untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Ferlia et al., 2023) Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dievaluasi setiap tahun dalam bentuk komentar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jawa Timur diumumkan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2022. Hal ini sangat membanggakan karena Pemerintah Kota Malang berhasil mempertahankan opini WTP yang kedua belas kalinya. Prestasi ini tentunya sangat mengagumkan, karena Pemkot Malang berhasil meraih gelar WTP Opini (<https://malangkota.go.id>). Sementara itu, Sejak Januari hingga Juni 2023, seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Malang menghadapi kesulitan dalam eksekusi putusan denda kasus korupsi. Pembayaran denda dari terpidana korupsi hanya mencapai Rp 5 juta, sedangkan pengembalian kerugian negara sesuai putusan hakim nihil. Salah satu terpidana, Candra Heri Putra, terlibat dalam kasus korupsi pembelian aset milik Pemkot Malang pada 2019-2020, melibatkan pemalsuan sertifikat tanah di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing. Bersama dua orang lainnya, total kerugian negara mencapai Rp 3,5 miliar. Candra awalnya dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya pada 12 Agustus 2020. Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tersebut, tetapi Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan pada 10 Juni 2022. Kejari Kota Malang juga memiliki banyak tanggungan eksekusi putusan denda kasus korupsi, termasuk kasus kredit fiktif BNI Syariah pada Puskopsyah Al Kamil Malang dengan terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra yang merugikan negara Rp 75,7 miliar, penyelewengan dana LPDB pada KSU Makmur Sejati Malang dengan terdakwa Mochammad Untung (DPO) yang menipis uang rakyat Rp 1,7 miliar. Dan korupsi Rp 1,4 miliar pengadaan bibit sapi Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang dengan terdakwa pasutri Siti Endah Nugrohini-Andri Mulia. Dari tiga kasus pada 2022, tidak ada yang berhasil dieksekusi sepenuhnya. Rudhy Dwi Chrysnaputra tidak memiliki harta, Mochammad Untung masih buron, dan Siti Endah Nugrohini masih dalam proses kasasi setelah putusan 3,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan. Andri Mulia memilih tidak mengajukan banding dalam kasus RPH Gate Jilid 2 (<https://radarmalang.jawapos.com>). Penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang menjadi sangat penting menyusul prestasi Pemerintah Kota Malang yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut. Dalam konteks kasus korupsi terkait pembelian aset milik Pemkot Malang, di mana eksekusi putusan denda mengalami kesulitan, penelitian di BKAD akan membantu mengevaluasi sistem pengendalian internal keuangan daerah. Kasus tersebut juga menggambarkan pentingnya peran BKAD dalam pengelolaan aset dan keuangan, khususnya terkait pemalsuan dokumen. Dengan adanya permasalahan pembayaran denda yang minim oleh terpidana korupsi, penelitian di BKAD akan menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Fokus penelitian juga mencakup identifikasi kebijakan dan prosedur yang dapat diperbaiki, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk memperbaiki sistem keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat luas yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sistem akuntansi yang masih belum tepat dalam penyusunan dan pengukuran transaksi ekonomi, serta sumber daya manusia yang masih belum memadai dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga masih terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan tersebut. BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh pihaknya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Apabila didalam penyelenggaraan pemerintah daerah ditemukan banyak kasus yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, maka akuntabilitas sulit untuk diwujudkan. Fenomena tersebut meunjukkan bahwa status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidaklah menjamin suatu daerah bebas dari korupsi, apalagi masih terdapat kelemahan dalam menjalankan sistem pengendalian internal dan tidak kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku (<http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id>).

Hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh (Zubaidi et al., 2019), (Nindyaningsih, 2022), dan (Juniartha & Sugiarto Asana, 2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sama hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agatha, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imelia & , Sri Rahayu, 2021), (Ningrum, 2022), (Ramadhan, 2023) dan (Philadelphiah et al., 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan (hidayat fahrul, 2023) "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)" adalah penulis menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia, dan penelitian yang dilakukan peneliti pada BKAD Kota Malang sebagai perluasan wawasan pengetahuan lebih luas dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan adanya *Gap Research* pada penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut Determinan tata kelola terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Good Governance government adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Saat ini good governance sangat ramai diperbincangkan, karena good governance adalah instrumen untuk mengukur ada atau tidaknya pekerjaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, partisipatif, efektif serta efisien dalam bekerja di dalam sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang atasan terhadap pegawai-pegawainya (Sutarsa, 2022).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Haeruddin, 2021). Sedangkan menurut (Yaya & Wahyuli, 2019) akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah mesti mampu memberi informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik. Dalam pemerintah daerah akuntabilitas didefinisikan sebagai keharusan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan yaitu masyarakat (Murniati, 2021).

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance (Mualifu et al., 2019). Pada Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2017, dikatakan transparan jika memiliki prinsip keterbukaan dan informasi yang jelas serta memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan feedback yang baik antara pemerintah dengan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik pula melalui kemudahan informasi yang dapat diakses masyarakat (Jaya Bahwiyanti, 2020).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut (Nurkhasanah, 2019) Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan atau keahlian individu di dalam sebuah organisasi atau suatu sistem lembaga untuk mengimplementasikan skillnya dan melaksanakan fungsi serta kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki keterampilan yang bagus, sikap yang baik dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Rahmadani & Zulaika, 2023).

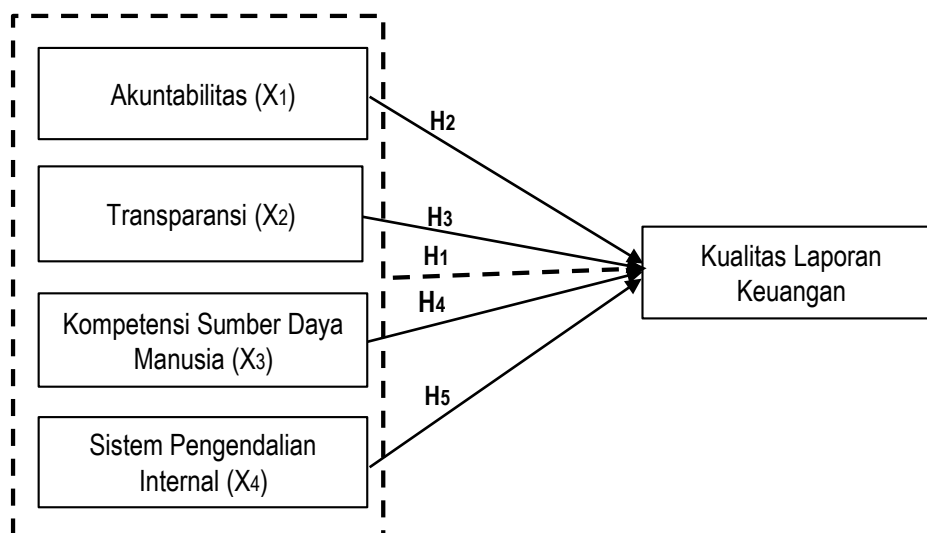
Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah rencana dan metode suatu badan atau organisasi untuk memelihara dan melindungi aset, menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mematuhi kebijakan manajemen (Indriasih et al., 2022).Menerapkan pengendalian internal adalah alasan utama untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan dilakukan dan bahwa tingkat risiko yang tidak terduga berkurang.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen yaitu akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia,dan sistem pengendalian internal. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan

Pengaruh akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia,dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (hidayat fahrul, 2023 dan Agatha, 2020) .Sedangkan (Lailatul Mukaromah, 2023) menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh secara positif memperkuat Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan,sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H1: akuntabilitas,transparansi,kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel (Lailatul Mukaromah, 2023). Arti kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan. Penjelasan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (hidayat fahrul, 2023), (Vidyasari & Suryono, 2021), (Murniati, 2021) dan (Fahiroh, 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Menurut (Yaya & Wahyuli, 2019) bahwa Transparansi merupakan cara pemerintahan menunjukkan kepada publik pekerjaan yang telah dilakukan secara bersih dan jujur, termasuk informasi tentang strategi, formulasi dan implementasinya, dan hasil yang dicapai. Dalam hal ini pemerintah memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik bagi mereka yang butuh informasi yang bebas dan mudah tentang proses penerapan keputusan yang dipilih.

Penjelasan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (hidayat fahrul, 2023), (Jaya Bahwiyanti, 2020), (Murniati, 2021), (Lailatul Mukaromah, 2023), (Fahiroh, 2022) dan (Rahayu & Dewi, 2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Informasi yang transparan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pada sebuah instansi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami teori-teori akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang kompeten akan memberikan hasil yang lebih baik terhadap pekerjaan atau tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya (Anggreni & Dewi, 2022). Kompetensi SDM mempunyai peran penting dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan, dimana SDM dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian akuntansi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah diperlukan pegawai yang memahami dan mengerti akuntansi beserta SAP (Sa'adah & Nasrullah, 2021). Penjelasan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Agatha, 2020), (Lailatul Mukaromah, 2023), (Nurkhasanah, 2019), (Rahmadani & Zulaika, 2023), (Sutrisna et al., 2022), (Imelia & , Sri Rahayu, 2021), (Trisnawati & Nugraha, 2021), dan (Hidayati et al., 2023) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (AgustiningTyas et al., 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan pemerintah no. 60 thn 2008 tentang SPIP: "Sistem pengendalian internal adalah suatu proses terpadu dari tindakan dan operasi yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, yaitu operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap publik, keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Ratih Amelia Fitri, 2023). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik (Reny Arinda, 2022). Penjelasan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (hidayat fahrul, 2023), (Sutrisna et al., 2022) dan (Imelia & , Sri Rahayu, 2021), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian untuk mengungkap kebenaran teori dengan mengolah data statistik yang diukur dengan menggunakan variabel penelitian yang dijelaskan dengan numerik (Sugiyono, 2020). Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara kuantitatif suatu masalah yang dinyatakan sehingga informasi yang diperlukan untuk analisis tersebut dapat dilengkapi. Penelitian membatasi ruang lingkup penelitiannya yaitu penelitian hanya dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, penelitian ini berfokus pada permasalahan pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 58 orang Pegawai BKAD Kota Malang.

3.1 Populasi Penelitian

No	Pegawai pada sekretariat /Bidang	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretriari	10
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	24
4.	Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah	14
5.	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	9
Jumlah		58

Sumber: BKAD Kota Malang, 2023

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, pengambilan sampel adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel yang dianggap benar dari suatu populasi sehingga dapat mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (total sampling). Sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel (Sugiyono, 2020). Sampling jenuh digunakan dengan alasan karena populasinya dibawah 100 sesuai dengan pendapat (Arikunto, 2020) yaitu apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi. Melihat jumlah populasi sebanyak 58 orang, oleh karena itu semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 58 orang. Pengumpulan data penelitian ini dengan kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan responden untuk menjawab sejumlah pertanyaan tertulis. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif, jika peneliti mengetahui bagaimana setiap variabel diukur dan apa yang diharapkan responden (Sugiyono, 2020). Didalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Variabel merupakan pusat perhatian didalam penelitian kuantitatif, secara singkat variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai.

Tabel 3.2 Defenisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Keuangan Kualitas Laporan	Laporan keuangan merupakan catatan informasi terkait keuangan pemerintahan dalam satu periode keuangan guna menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi (hidayat fahrul, 2023).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami (Sujana et al., 2020)	Likert
Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum	Likert

	mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Yaya & Wahyuli, 2019).	2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan (Yaya & Wahyuli, 2019)	
Transparansi	Transparansi merupakan cara pemerintahan menunjukkan kepada publik pekerjaan yang telah dilakukan secara bersih dan jujur, termasuk informasi tentang strategi, formulasi dan implementasinya, dan hasil yang dicapai (Yaya & Wahyuli, 2019).	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan (Fahiroh, 2022)	Likert
Kompetensi SDM	Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan atau keahlian individu di dalam sebuah organisasi atau suatu sistem lembaga untuk mengimplementasikan skillnya dan melaksanakan fungsi serta kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurkhasanah, 2019).	1. Kemampuan 2. Keterampilan 3. Pengetahuan (Zubaidi et al., 2019)	Likert
Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal adalah suatu kegiatan dan aktivitas yang terintegrasi yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh karyawan secara berkesinambungan untuk menjamin terwujudnya tujuan suatu organisasi (Sujana et al., 2020).	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Internal (Sujana et al., 2020).	Likert

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel dependen dalam penelitian adalah kualitas laporan keuangan daerah (Y) dan variabel independennya adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Kompetensi SDM (X3) dan SPI (X4). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dari variabel independen terhadap variabel dependen, dapat digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

α = Konstanta.

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen.

X1 = Akuntabilitas.

X2 = Transparansi

X3 = Kompetensi SDM

X4 = SPI

e = Kesalahan pengganggu (error term).

Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, agar hasil dari analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang valid.

a. Uji Normalitas. Menurut (Ghozali, 2019) menjelaskan bahwa uji normalitas dipakai guna mengetahui apakah distribusi data mendekati normal. Uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat digunakan untuk

menentukan apakah variabel pengganggu memiliki ditribusi normal atau abnormal. Tingkat signifikansi uji K-S harus $> 0,05$ agar regresi dikatakan mempunyai distribusi normal dari data residual.

b. Uji Multikolinieritas; digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi terdapat korelasi. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen, model regresi dianggap baik. Uji multikolinearitas dapat ditemukan dari nilai VIF dan nilai tolerance. Jika nilai dari VIF < 10 serta nilai tolerance $> 0,01$ maka model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Akan tetapi ketika nilai dari VIF > 10 serta nilai tolerance $< 0,01$ model regresi terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2019).

c. Uji Heteroskedastisitas; digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan varians antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi dinilai baik ketika model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas untuk dapat mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dengan uji Glejser yaitu melakukan regresi antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika probabilitas menunjukkan signifikansi $> 5\%$ maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2019).

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia dan SPI. Uji F dipakai untuk menilai akurasi fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai sesungguhnya secara statistik (Ghozali, 2019). Uji F dilihat dari perbandingan nilai (Sig.) F dengan ketepatan signifikan 5% atau $0,05$. Variabel independen berpengaruh signifikan dengan variabel dependen ketika nilai probabilitas signifikansi $< 5\%$. Namun apabila nilai probabilitas $> 5\%$, maka variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen (Y).

Uji Hipotesis

Uji t dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji t dipakai untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel independen guna menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2019). Uji t dijalankan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Tabel coefficients dalam kolom sig juga menunjukkan hasil uji t. Ketika probablilitas nilai signifikansi $< 0,05$ serta thitung $>$ ttabel artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Hipotesis yang dieksplorasi dalam penelitian ini tentang pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), dan sistem pengendalian internal (X4) pada kualitas laporan keuangan daerah (Y) di BKAD Kota Malang. Untuk menyelidiki hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi berganda dengan IBM SPSS versi 26for windows.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov Test terhadap masing-masing variabel menggunakan level of significant (α) 5% , adapun data disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 uji normalitas (kolmogrof smirnov test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17723399
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,076
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065 ^c

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1, menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorof Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan $0,065 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF $> 10,0$ maka terjadi multikolinieritas. Dan sebaliknya apabila VIF $< 10,0$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	0,451	2,218	Non Multikolinieritas
Transparansi (X ₂)	0,515	1,943	Non Multikolinieritas
Kompetensi SDM (X ₃)	0,411	2,432	Non Multikolinieritas
SPI (X ₄)	0,368	2,717	Non Multikolinieritas

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas (X₁), transparansi (X₂), kompetensi sumber daya manusia/SDM (X₃), dan sistem pengendalian internal/SPI (X₄) memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gledser, yang mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Adapun untuk mengetahui terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas (Uji Gledser)

Variabel	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	0,100	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi (X ₂)	0,152	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompetensi SDM (X ₃)	0,743	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPI (X ₄)	0,080	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	Keterangan
	B	Std. Error	Beta	
Konstanta	13,925	3,004		
X ₁	0,680	0,133	0,285	Positif
X ₂	0,305	0,126	0,406	Positif
X ₃	0,333	0,112	0,210	Positif
X ₄	0,423	0,104	0,342	Positif

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui maka didapatkan model persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 13,925 + 0,680 + 0,305 + 0,333 + 0,423$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 13,925 artinya jika variabel akuntabilitas (X₁), transparansi (X₂), kompetensi sumber daya manusia (X₃), dan sistem pengendalian internal (X₄) memiliki nilai konstanta 0, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) nilainya adalah 13,925. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X₁) sebesar 0,680 artinya jika variabel independen akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 maka variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,680, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi variabel transparansi (X₂) sebesar 0,305 artinya jika variabel independen transparansi mengalami kenaikan sebesar 1 maka variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,305, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X₃) sebesar 0,333 artinya jika variabel independen kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan sebesar 1 maka variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,333, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X₄) sebesar 0,423 artinya jika variabel independen sistem pengendalian internal mengalami kenaikan sebesar 1 maka variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,423, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh positif variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Adapun besarnya nilai masing-masing pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji t Parsial

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig t	Ket.
Akuntabilitas (X ₁)	3,991		0,000	Signifikan
Transparansi (X ₂)	2,780	2,005	0,029	Signifikan
Kompetensi sumber daya manusia (X ₃)	3,037		0,009	Signifikan
Sistem pengendalian internal (X ₄)	3,110		0,005	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t diketahui: Variabel akuntabilitas (X₁) memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} (3,991 > 2,005) dengan nilai signifikan 0,000 (p value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Variabel transparansi (X₂) memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} (2,780 > 2,005) dengan nilai signifikan 0,029 (p value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X₃) memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} (3,037 > 2,005) dengan nilai signifikan 0,009 (p value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Variabel sistem pengendalian internal (X₄) memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} (3,110 > 2,005) dengan nilai signifikan 0,005 (p value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan (bersama-sama) variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang, dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji F (Simultan)

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig F
Akuntabilitas (X ₁)			
Transparansi (X ₂)			
Kompetensi sumber daya manusia (X ₃)	17,486	2,546	0,000
Sistem pengendalian internal (X ₄)			

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,486 > 2,546$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ($p\ value < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kompetensi sumber daya manusia, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima, yaitu secara simultan (bersama-sama) variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Hasil analisis regresi berganda juga menunjukkan nilai *R Square* (R²) sebesar 0,569 yang berarti bahwa kontribusi pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal, terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 56,9% dan sisanya sebesar 0,431 (43,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti: teknologi informasi, budaya organisasi, atau struktur kepemimpinan, dan lain-lain.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima, yaitu secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Sedangkan pada hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien positif, artinya semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah akuntabilitas yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang maka semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hidayat Fahrul, 2023), (Yusriani, 2020) dan (Laksono, 2023) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang, maka dapat digambarkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa hipotesis ketiga (H₃) diterima, yaitu ada pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien regresi positif, hal ini memberikan arti bahwa ada pengaruh positif variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan, berarti bahwa ada hubungan searah antara transparansi dan kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh BKAD Kota Malang, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Liu, 2020) dan (Murniati, 2021) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa hipotesis keempat (H₄) diterima, yaitu ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Hasil analisis regresi berganda memperoleh nilai koefisien regresi positif,

artinya ada pengaruh positif variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai khususnya di bagian keuangan BKAD Kota Malang, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zubaidi et al., 2019), (Plutzer, 2021), (Amalia, 2023), dan (Kambey et al., 2023) yang juga menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima, yaitu secara parsial tidak ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Hasil analisis regresi juga diperoleh nilai koefisien regresi positif, artinya bahwa ada pengaruh positif variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kata penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2023) dan (Saputra & Rahayu, 2020) yang membuktikan bahwa ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal jika dilihat dari pengertiannya menurut (Indriasih et al., 2022) adalah rencana dan metode suatu badan atau organisasi untuk memelihara dan melindungi aset, menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mematuhi kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti dapat berpendapat bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan. Sistem ini membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar, data keuangan diproses dengan tepat, dan kesalahan atau penipuan dapat dideteksi dan diperbaiki dengan cepat. Sistem pengendalian internal di BKAD Kota Malang dapat mencakup berbagai elemen, seperti prosedur pengendalian, audit internal, dan pelatihan untuk staf

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya diperoleh bahwa Akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pejabat BKAD Kota Malang maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang, artinya semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah akuntabilitas yang diterapkan oleh BKAD Kota Malang maka semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh BKAD Kota Malang, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang. Pengaruh positif variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Malang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai khususnya di bagian keuangan BKAD Kota Malang, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Sistem Pengendalian Internal di BKAD Kota Malang telah memberikan dampak baik kepada pejabat yang mengelola keuangan, sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. BKAD Kota Malang disarankan untuk terus meningkatkan tingkat akuntabilitas mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan transparansi, menyediakan pelatihan yang memadai untuk staf, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan demikian, BKAD Kota Malang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan publik. Penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu terkait kualitas laporan keuangan, maka diharapkan untuk mencoba menganalisis variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti: teknologi informasi, budaya organisasi, atau struktur kepemimpinan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, K. V. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Agustining Tyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Amalia, M. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat) The Effect of Regional Financial Management and Human Resource Competence on the*. 4(1), 79–89.
- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 490–500.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahiroh, J. Iuluk. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haeruddin, S. (2021). The Effect of Good Governance on Financial Performance: An Empirical Study on the Siri Culture*. *Syahril IDRIS / Journal of Asian Finance*, 8(5), 795–0806. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0795>
- hidayat fahrul, D. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)*. 31–41.
- Hidayati, R., Hayu, D., & Kinasih, W. (2023). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Sebagai Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 142–148. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Imelia, D., & Sri Rahayu, W. (2021). *HE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY, PARTICIPATION OF BUDGET DEVELOPMENT, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN*, P. 6(3), 149–163.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Jaya Bahwiyanti, A. S. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN KINERJA PENGELOLAAN SKPD DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(November), 1–12. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Juniartha, I. W., & Sugiarto Asana, G. H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.16>
- Kambey, J. P., Tawas, Y., & Tendean, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 642–653. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5037>
- Lailatul Mukaromah, L. R. R. R. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PONDOK PESANTREN ANNURIYAH JEMBER*. 8(2), 1–33.
- Laksono, R. G. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA SKPD*

- KABUPATEN JEMBER. 12(5), 3155–3170.
- Liu, M. S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*.
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Murniati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 139–148.
- Nindyaningsih, B. E. T. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat. Vol. 19, N, 19–39.
- Ningrum, K. K. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. *E-Journal UAJY*, 39–54.
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53(9), 1689–1699.
- Philadelphialia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i1.777>
- Plutzer, M. B. B. and E. (2021). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. 6.
- Pratiwi, D., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., Dan, B., Islam, U., Raden, N., & Said, M. A. S. (2023). *INFORMASI AKUNTANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA*.
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 464–471.
- Rahmadani, P. D., & Zulaika, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jemba*, 2(1), 163–170.
- Ramadhan, M. F. S. (2023). The Effect Of Application Of Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting Systems, Internal Control Systems, And Human Resource Competence On The Quality Of Financial Reports (Study on Regional Work Units of Karawang Regency 2022). *Agustus*, 10(4), 2038.
- Ratih Amelia Fitri, F. I. A. (2023). *Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariama*. 5(3), 1115–1126.
- Reny Arinda. (2022). The Influence Of Human Resource Competence, Community Participation And Internal Control System On Accountability Of Financial Management Of School Operational Assistance Funds (BOS) In State High Schools And Vocational Schools In Pekanbaru City. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3600–3616. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Sa'adah, S., & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2614>
- Saputra, F. T., & Rahayu, S. (2020). the Implementation of Government Accounting Standards, the Government Internal Control System and the Competence of Human Resources of Quality of Financial Statements With Organizational Commitments As Moderating Variable in Tanjung Jabung Barat. *Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 268–279. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Sutarsa, M. (2022). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 22–47.
- Sutrisna, M., Nadirsyah, N., & Indayani, I. (2022). The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study on South Aceh Government SKPK). *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(3), 124–134. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i3.311>
- Trisnawati, N. A., & Nugraha, A. A. (2021). The Influence of Human Resource Competencies, Internal Control Systems, Information Technology and Organizational Commitment on the Quality of Government Financial Reports. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(4), 231–240.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 4.
- Yaya, R., & Wahyuli, H. (2019). *Determinants of Financial Statements Quality in Village Government*. 102(Icaf), 134–138. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.22>
- Yusriani, H. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal). *Skripsi Universitas Pancasakti Tegal*.
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 3(2), 68–76.